

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2025

Pada hari ini, .. tanggal .. bulan tahunbertempat di Kota Bogor telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu(disebutkan jangka waktunya)
			Akibat bila Dibuka	Manfaat bila Ditutup	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/CapPPID/Badan Publik

LIA KANIA DEWI



PEMERINTAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122
Telp. 0251 – 8321075 Ext. 214 Fax. 0251 – 8326 530
www.kotabogor.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor : 027/167.a-PBJ/IX/2025
Tanggal : 17 September 2025

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana setiap badan Publik Wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi mengenai Informasi yang dikecualikan pada hari ini Rabu 17 September 2025 di Ruang Rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor. Yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan Uji Konsekuensi sebanyak 9 (Sembilan) Informasi sebagaimana terlampir. Hasil Uji Konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) Informasi dinyatakan dikecualikan demikian berita acara uji konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Lia Kania Dewi, <u>S.Si</u> , M.M.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
2	Undang Sulaeman, <u>S.E., M.Si.</u>	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
3	Iftauddin, S.P., <u>M.Si.</u>	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
4	Layungsari, S.Kom., M.T.I.	Pranata Komputer Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
5	Yudi Fitrani, S.H.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
6	Flandiansyah Achmad Wilastra, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
7	Eko Iriyanto, S.M.	Pengadministrasi Perkantoran	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui,

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

LIA KANIA DEWI, S.Si, M.M.

Pembina Tingkat I - IV/b

NIP. 19700123 199902 2 001



PEMERINTAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122
Telp. 0251 – 8321075 Ext. 214 Fax. 0251 – 8326 530
www.kotabogor.go.id

Notulen Rapat

- 1. Hari/Tanggal : Rabu / 17 September 2025
- 2. Pukul : 08.30 s/d Selesai
- 3. Tempat : Ruang Rapat Pengadaan Barang dan Jasa
- 4. Acara : Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Bogor
- 5. Pimpinan Rapat : Kepala Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Bogor
- 6. Peserta Rapat :

No	Nama	Jabatan
1	Lia Kania Dewi, <u>S.Si</u> , M.M.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	Undang Sulaeman, S.E., <u>M.Si</u> .	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3	Iftauddin, S.P., <u>M.Si</u> .	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
4	Layungsari, S.Kom., M.T.I.	Pranata Komputer Ahli Muda
5	Yudi Fitrani, S.H.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
6	Flandiansyah Achmad Wilastra, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
7	Eko Iriyanto, S.M.	Pengadministrasi Perkantoran

Resume Rapat :

- 1. Terkait Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan mengacu peraturan yang berlaku antara lain : UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik,
- 2. Pada Tahun 2025 telah dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang menghasilkan Informasi yang Dikecualikan di antaranya adalah sebagai berikut :

1	Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
2	Dokumen Pemilihan
3	Dokumen Penawaran Teknis dan Harga peserta tender
4	Berita Acara Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga peserta tender
5	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
6	Surat Penetapan Pemenang Tender
7	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
8	Kontrak antara PPK dan PT. Menara Setia
9	Dokumen Jaminan Pelaksanaan dari PT. Menara Setia

Penutup.

Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik

Notulis,



YUDI FITRANI, SH.

Penata Tingkat I - III/d

NIP. 19850208 201101 1 001

**DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Tujuh Belas* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di *Kota Bogor* telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Akibat bila Dibuka	Manfaat bila Ditutup	
1	Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya - Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan	Menjaga kerahasiaan dan integritas proses tender, menghindari adanya intervensi selama proses tender, merusak persaingan usaha yang sehat, dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi (permohonan disampaikan masih dalam proses tender/sangguh banding)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun
2	Dokumen Pemilihan	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya - Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan	Menjaga kerahasiaan dan integritas proses tender, menghindari adanya intervensi selama proses tender, merusak persaingan usaha yang sehat, dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi (permohonan disampaikan masih dalam proses tender/sangguh banding)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun

3	Dokumen Penawaran Teknis dan Harga peserta tender	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya - Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan	Menjaga kerahasiaan dan integritas proses tender, menghindari adanya intervensi selama proses tender, merusak persaingan usaha yang sehat, dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi (permohonan disampaikan masih dalam proses tender/sangguh banding)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun
4	Berita Acara Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga peserta tender	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya - Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan	Menjaga kerahasiaan dan integritas proses tender, menghindari adanya intervensi selama proses tender, merusak persaingan usaha yang sehat, dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi (permohonan disampaikan masih dalam proses tender/sangguh banding)	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun
5	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya - Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Menjaga kerahasiaan dan integritas proses tender, menghindari adanya intervensi selama proses tender, merusak persaingan usaha yang sehat, dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan informasi (permohonan disampaikan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun

		LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan	masih dalam proses tender/sangguh banding)		
6	Surat Penetapan Pemenang Tender	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya - Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan	Penetapan dilakukan dengan mengklik penetapan pemenang pada Aplikasi SPSE, tidak dilakukan melalui surat		70 tahun
7	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	Dokumen tidak dikuasai oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor	~	~	
8	Kontrak antara PPK dan PT. Menara Setia	Dokumen tidak dikuasai oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor	~	~	
9	Dokumen Jaminan Pelaksanaan dari PT. Menara Setia	Dokumen tidak dikuasai oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor	~	~	



PEMERINTAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122
Telp. 0251 – 8321075 Ext. 214 Fax. 0251 – 8326 530
www.kotabogor.go.id

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Lia Kania Dewi, <u>S.Si</u> , M.M.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
2	Undang Sulaeman, S.E., <u>M.Si</u> .	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
3	Iftauddin, S.P., <u>M.Si</u> .	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
4	Layungsari, S.Kom., M.T.I.	Pranata Komputer Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
5	Yudi Fitrani, S.H.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
6	Flandiansyah Achmad Wilastra, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	
7	Eko Iriyanto, S.M.	Pengadministrasi Perkantoran	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bogor	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



LIA KANIA DEWI, S.Si, M.M.
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19700123 199902 2 001



PEMERINTAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122

Telp. 0251 – 8321075 Ext. 214 Fax. 0251 – 8326 530

www.kotabogor.go.id

DAFTAR HADIR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	La Kania Dewi	Bag PIS	
2.	Undangs	bag PB	
3.	Haudim.	Bagian PB	
4.	Lyung Sari	Bagian PB	
5.	Yudi-F	Bagian PB	
6.	Flandiansyah	Bagian PB	
7.	Eko Iryanto	Bagian PB	